

Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang

Qonita Widyaning Ratri¹, Evi Priyanti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang

¹qonitawidya10@gmail.com, ²evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id

Dikirim: 17 November 2021 Direvisi: 7 Desember 2021 Diterima: 23 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karawang. Dengan meningkatnya banyak gelandangan dan pengemis tiap tahun, maka diperlukan adanya penanggulangan. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Satpol PP Kabupaten Karawang melaksanakan koordinasi untuk melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karawang belum maksimal. Dalam hal tersebut dapat dilihat dari faktor pembagian kerja dan disiplin. Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Karawang dalam melaksanakan penertiban atau operasi razia gelandangan serta pengemis perlu adanya evaluasi kembali serta terbatasnya sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Satpol PP Kabupaten Karawang, sehingga mempengaruhi pelaksanaan dari penanggulangan gelandangan pengemis di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Koordinasi, Penanggulangan, Gelandangan dan Pengemis

Abstract

This study discusses Government Coordination in Handling Homeless and Beggars in Karawang Regency. With the increasing number of homeless and beggars every year, it is necessary to have prevention. Therefore, the Social Service of Karawang Regency and the Satpol PP of Karawang Regency are coordinating to carry out the prevention of homelessness and beggars in Karawang Regency. The purpose of this study was to determine how Government Coordination in Handling Homeless and Beggars in Karawang Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that Government Coordination in Handling Homeless and Beggars in Karawang Regency was not optimal. This can be seen from the factors of division of labor and discipline. In this case, the Satpol PP of Karawang Regency in controlling homeless and beggars needs a re-evaluation as well as the limited human resources and budget owned by the Karawang Regency Social Service and the Karawang Regency Satpol PP, so that it affects the implementation of tackling homeless beggars in Karawang Regency.

Kata kunci: Coordination, Prevention, Homeless and Beggars.

PENDAHULUAN

Istilah gelandangan atau pengemis seringkali disingkat “gepeng”. Penduduk di Indonesia sudah sangat kenal dengan singkatan “gepeng” tersebut, dimana tidak hanya menjadi kosakata secara umum untuk percakapan sehari-hari, namun juga menjadi pemberitaan di berita-berita dan menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah pada kelompok orang-orang tertentu yang sering kita jumpai di tempat kota besar tentang adanya keberadaan gelandangan maupun pengemis yang tidak punya suatu pekerjaan atau biasa sering disebut tunawisma. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980), gelandangan ialah suatu orang yang hidup dengan kondisi tidak sesuai dengan norma kehidupan yang secara layak di masyarakat, dan juga tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan yang menetap. Sedangkan, pengemis ialah suatu orang yang dapat penghasilan dengan cara meminta atau mengemis di tempat umum supaya mendapatkan rasa iba dari orang lain.

Berdasarkan dalam (Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945), mengamanatkan bahwa negara wajib untuk tidak menelantarkan anak terlantar serta fakir miskin. Bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dimaksud didalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah serta pemerintah daerah dapat memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial dalam perwujudan untuk melaksanakan kewajiban negara dan dapat memenuhi hak serta kebutuhan dasar warga negara yang tidak mampu. Dalam sebuah kerjasama pemerintahan, merupakan kegiatan yang terorganisir antar lembaga instansi atau dinas. Penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang merupakan tugas atau fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Karawang. Dalam koordinasi tersebut, fungsi koordinasi menjadi tujuan untuk dapat meningkatkan hubungan kerjasama melalui koordinasi.

Dalam hal ini, koordinasi ialah suatu fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas-tugas yang dijalankan dari macam-macam bagian kerja, misalnya bagian yang terdapat didalam organisasi. Pada koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan Satpol PP Kabupaten Karawang yaitu suatu tugas yang harus terlaksana dengan baik, yaitu dengan hubungan kerja yang dapat efektif. Kemudian, dalam hal ini juga koordinasi yang dilakukan tersebut sangat penting kaitannya dalam penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang. Operasi pemeriksaan atau razia gelandangan serta pengemis ini akan rutin dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karawang. Operasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan sesuai (Peraturan Daerah Nomor 6, 2011) tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Sebab keberadaan pengemis dan gelandangan ini cukup mengganggu kenyamanan masyarakat. Maka dari itu, Satpol PP bertugas untuk merazia atau menertibkan gelandangan serta pengemis yang berada di Kabupaten Karawang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang dibuat dalam menangani masalah gelandangan serta pengemis yaitu (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun, 2012) tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk melakukan pembinaan oleh Dinas Sosial memerlukan rumah singgah untuk menampung gelandangan serta pengemis supaya jangan ada lagi gelandangan serta pengemis yang tidur atau mengemis dipinggir jalan. Sementara ini, untuk pembinaan, bimbingan serta pelatihan bagi gelandangan dan pengemis dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Karawang. Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Karawang terdapat panti yang dimana

panti tersebut dipisah untuk lelaki dengan perempuan. Permasalahan lain selain infrastruktur bangunan, jumlah gelandangan dan pengemis yang meningkat, sumber daya manusia serta anggaran juga diperlukan untuk membuat rumah singgah dan dalam menjalankan kegiatan penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang. Banyak gelandangan serta pengemis yang terus naik dari tahun 2017-2019 sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah data PMKS

NO	JENIS	2019	2018	2017
1	Balita Terlantar	59	82	82
2	Anak Terlantar	4515	4515	4515
3	Lanjut Usia Terlantar	15230	17009	19530
4	Wanita Tuna Susila	158	158	158
5	Gelandangan	194	62	62
6	Pengemis	49	16	16
7	Korban Napza	106	629	629
8	ODHA	266	501	501

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa banyak gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang meningkat dari tahun 2017-2019, hal ini perlu adanya penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Satpol PP Kabupaten Karawang.

Koordinasi yaitu menjalankan sebuah anggota dan memberikan tempat tugas pekerjaan kepada bagiannya masing-masing serta menjaga supaya suatu tugas atau kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan kebersamaan yang semestinya diantara para anggota tersebut pendapat dari E.F.L Brech (Malayu, 2016). Lebih lanjut, G.R Terry (Malayu, 2016) koordinasi merupakan usaha yang baik dan terarah untuk menyiapkan banyak waktu yang tepat, serta membimbing suatu kegiatan untuk menghasilkan perbuatan yang selaras pada tujuan tersebut.

(Usman Husaini, 2013) menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses mengintegrasikan agar terlaksananya kegiatan yang dapat dipisah untuk mendapatkan tujuan yang efisien dan efektif. Lebih lanjut, Sutisna (Usman Husaini, 2013) koordinasi merupakan suatu tahap untuk menyatukan bagian-bagian dari orang lain, serta sumber yang lain untuk terciptanya tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, White (Inu Kencana Syafii, 2006) koordinasi ialah menyesuaikan diri dari tiap-tiap bagian serta mengoperasikan tiap-tiap bagian dalam waktu yang tepat, maka dengan demikian tiap-tiap bagian dapat menyatukan hasil keseluruhan.

Kemudian, faktor koordinasi menurut (Malayu, 2016) bahwa merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam koordinasi, diantaranya yaitu:

1. Kesatuan Tindakan

Pada dasarnya, sebuah koordinasi membutuhkan hal yang dirasakan oleh setiap anggotanya dalam penyesuaian diri atau kegiatannya terhadap setiap anggota atau suatu organisasi, supaya suatu anggota atau organisasi disini tidak menjalankannya dengan masing-masing. Oleh karena itu, faktor dalam kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi.

Maksud dari kesatuan dari pada usaha merupakan agar pemimpin dapat mambagi usahanya pada tiap kegiatannya sendiri, agar dapat keselarasan untuk mendapatkan hasil yang dapat tercapai. Dalam kesatuan tindakan disini yaitu suatu keharusan yang dijalankan untuk mendapatkan koordinasi yang baik atau dengan dapat mengatur waktunya agar berjalan dan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan sebelumnya.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan kebutuhan setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya di masyarakat. Komunikasi juga penting, karena dalam melakukan komunikasi partisipasi suatu anggota atau tim akan semakin bagus, dan juga atasan atau pimpinan dapat diberitahukan kegiatan yang dapat dijalankan kepada bawahannya, yaitu dengan cara melakukan komunikasi.

3. Pembagian Kerja

Dalam hal ini, tujuan pembagian kerja didalam sebuah organisasi yaitu mendapatkan tujuan bersama, yang dimana tiap masing-masing orang tidak dapat menjalankannya sendiri. Dalam suatu kelompok bekerjasama serta berkoordinasi dan mencapai hasil lebih daripada dijalankan oleh seorang. Adanya pembagian kerja disini juga berharap dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, harus adanya pembagian tugas atau kegiatan pada tiap-tiap orang agar lebih efektif.

4. Disiplin

Dalam sebuah organisasi, tiap-tiap bagian dapat bekerjasama dengan koordinasi, supaya tiap-tiap orang menghasilkan hasil yang dapat diharapkan. Oleh karena itu, tiap-tiap orang memberikan sebuah usaha dengan maksimal supaya dapat hasil yang menyeluruh, maka dari itu perlu adanya disiplin. Jadi lebih jelasnya, disiplin merupakan suatu perilaku atau sikap, baik itu individu maupun tim dan dapat mematuhi terhadap aturan atau peraturan.

Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana koordinasi yang dapat dilakukan oleh Dinas.Sosial Kabupaten Karawang dan Satuan.Polisi Pamong Praja Kabupaten.Karawang dalam penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada suatu masalah meliputi sebuah kegiatan penilaian terhadap sikap atau pendapat terhadap masing-masing organisasi, kondisi atau prosedur (Sudaryono, 2017). Sedangkan, Cooper H. M (Sudaryono, 2017), mengemukakan bahwa dalam penelitian deskriptif ialah penelitian yang untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik dalam satu variabel atau lebih tanpa buat perbandingan dengan variabel yang lainnya. Selain itu, didalam pendekatan kualitatif (Sudaryono, 2017) mengemukakan bahwa dalam suatu penelitian kualitatif ialah penelitian yang berupaya menganalisa kehidupan sosial dan menggambarkan dunia sosial dari penglihatan masing-masing dalam sebuah latar alamiah. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif berupaya untuk dapat dimengerti bagaimana tiap masing-masing orang melihat menggambar dunia sosial tersebut. Kemudian, Creswell (Sudaryono, 2017) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ialah metode penelitian untuk berusaha dengan menggambarkan dan menginterpretasikan sebuah objek yang apa adanya. Metode pengumpulan data adalah suatu hal yang sangat penting untuk penelitian yang dilaksanakan dengan mendapatkan bahan-bahannya, fakta dan berbagai informasi-informasi yang dapat dipercayai (Sudaryono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan koordinasi pemerintahan terhadap penanggulangan gelandangan pengemis di Kabupaten Karawang, peneliti menggunakan teori koordinasi menurut (Malayu, 2016) menyatakan bahwa koordinasi terdiri dari 4 faktor, antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Kemudian, dari faktor tersebut peneliti membuat pedoman wawancara yang digunakan untuk melakukan wawancara terhadap informan yang kemudian hasil wawancara tersebut dijabarkan dalam objek penelitian.

1. Kesatuan Tindakan

Pada dasarnya, sebuah koordinasi membutuhkan hal yang dirasakan oleh setiap anggotanya dalam penyesuaian diri atau kegiatannya terhadap setiap anggota atau suatu organisasi, supaya suatu anggota atau organisasi disini tidak menjalankannya dengan masing-masing. Satpol PP Kabupaten Karawang telah menertibkan para gelandangan dan juga pengemis yang berada di jalanan, lampu merah, rel kereta api, jembatan serta emperan toko sebagaimana pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Penertiban atau Razia Gelandangan dan Pengemis
Sumber: Satpol PP Kabupaten Karawang

Maka dari itu, Satpol PP Kabupaten Karawang melakukan penertiban atau menjaring razia para gelandangan tersebut dan di data kemudian dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Karawang, sebagaimana pada gambar 1.2 berikut:



Gambar: 1.2 Gelandangan dan Pengemis Setelah Dilakukan Pendataan
Sumber: Dinas Sosial Kabuapten Karawang

Setelah itu gelandangan dan pengemis dibawa ke UPTD LBK Kabupaten Karawang untuk dilakukan pelatihan atau bimbingan selama kurang lebih 4 hari. Adapun bimbingannya

yaitu bimbingan motivasi, bimbingan kewirausahaan, bimbingan etika bermasyarakat dan bimbingan keterampilan. Bentuk pelatihannya seperti membuat trails, pot bunga dan tata boga. Sedangkan bantuan sosialnya seperti 1 paket las listrik, topi untuk menutup muka, besi-besi dan cat setelah dilakukan pelatihan dan bimbingan oleh UPTD LBK Kabupaten Karawang. Setelah dilakukan pelatihan dan bimbingan, gelandangan serta pengemis di pulangkan ke tiap daerahnya.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan kebutuhan setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya di masyarakat. Komunikasi juga penting, karena dalam melakukan komunikasi partisipasi suatu anggota atau tim akan semakin bagus, dan juga atasan atau pimpinan dapat diberitahukan kegiatan yang dapat dijalankan kepada bawahannya, yaitu dengan cara melakukan komunikasi. Satpol PP Kabupaten Karawang hanya menjalankan Undang-Undang saja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam komunikasi mengenai alur informasi terhadap koordinasi yaitu melakukan komunikasi melalui Bupati terlebih dahulu, kemudian ke Satpol PP Kabupaten Karawang dan Dinas Sosial Kabupaten Karawang, kemudian untuk komunikasinya hanya menggunakan *whatsapp* dan email saja.

3. Pembagian Kerja

Dalam hal ini, tujuan pembagian kerja didalam sebuah organisasi yaitu mendapatkan tujuan bersama, yang dimana tiap masing-masing orang tidak dapat menjalankannya sendiri. Dalam suatu kelompok bekerjasama serta berkoordinasi dan mencapai hasil lebih daripada dijalankan oleh seorang. Adanya pembagian kerja disini juga berharap dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, harus adanya pembagian tugas atau kegiatan pada tiap-tiap orang agar lebih efektif. Untuk pembagian kerja yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu dengan diadakannya pembinaan sebagaimana pada gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3 Pembinaan Langsung oleh Bupati Karawang bagi Gelandangan dan Pengemis
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang

Satpol PP dengan melakukan penertiban serta pendataan, dalam melihat kondisi penertiban gelandangan serta pengemis yang dijalankan oleh Satpol PP di Kabupaten Karawang, saat ini perlu evaluasi kembali untuk menunjang dalam penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang, padahal dalam faktor pembagian kerja, Satpol PP Kabupaten Karawang melakukan penertiban gelandangan dan pengemis sehari 3 kali dalam hal sudah ditetapkan dalam SOP dan jadwal penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang.

4. Disiplin

Dalam sebuah organisasi, tiap-tiap bagian dapat bekerjasama dengan koordinasi, supaya tiap-tiap orang menghasilkan hasil yang dapat diharapkan. Koordinasi merupakan suatu dari menyesuaikan tiap-tiap bagian yang berbeda, supaya kegiatan dari tiap-tiap bagian tersebut dapat cepat selesai diwaktu yang tepat. Oleh karena itu, tiap-tiap orang memberikan sebuah usaha dengan maksimal supaya dapat hasil yang menyeluruh, maka dari itu perlu adanya disiplin. Jadi lebih jelasnya, disiplin merupakan suatu perilaku atau sikap, baik itu individu maupun tim dan dapat mematuhi terhadap aturan atau peraturan. Untuk menciptakan disiplin yang baik harus ada kebijakan yang mendukung di dalamnya. Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Satpol PP Kabupaten Karawang sudah tranparan dalam kegiatan menyangkut gelandangan dan pengemis dan sudah diatur dalam kebijakannya masing-masing selama proses koordinasi. Terkait kendala, karena masih kurangnya sumber daya manusia dan anggaran serta ketidakpuasan saat penertiban gelandangan dan pengemis yang ujung-ujungnya dilepaskan lagi setelah di data oleh Satpol PP Kabupaten Karawang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan dukungan data-data temuan yang dapat diperoleh di lapangan berkaitan dengan koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Karawang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari faktor pembagian kerja dan faktor disiplin yaitu dilihat dari pembagian kerja masing-masing, Satpol PP Kabupaten Karawang melakukan operasi razia gelandangan serta pengemis, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Karawang melakukan pembinaan dan dilakukan bimbingan serta pelatihan di UPTD LBK Kabupaten Karawang. Tetapi, dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Karawang masih belum maksimal untuk melakukan penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang, hal ini perlu adanya evaluasi lagi terkait penertiban gelandangan dan pengemis untuk menunjang dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang. Padahal, dalam SOP juga sudah dijelaskan terkait jadwal penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan sehari 3 kali. Kemudian, faktor disiplin dilihat dari kebijakan yang mengatur selama koordinasi berjalan, sejauh ini sudah disiplin dan transparan dalam melakukan penertiban, pendataan, pembinaan, bimbingan serta pelatihan. Karena, jika tidak disiplin akan dikenakan sanksi berupa teguran. Namun, terkait sumber daya manusia dan anggaran masih kurang dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang.

REFERENSI

- Handyaningrat. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung.
- Inu Kencana Syafii. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Malayu, H. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Daerah Nomor 6. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011*. Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun. (2012). *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012*. Tentang Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980. (n.d.). *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
Usman Husaini. (2013). *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.